



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di
Turki dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb
Model (2015-2019)***

Skripsi

Oleh

Rizky Adi Kurniawan

6091801175

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki
dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb Model* (2015-2019)

Skripsi

Oleh

Rizky Adi Kurniawan

6091801175

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rizky Adi Kurniawan
Nomor Pokok : 6091801175
Judul : Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb Model* (2015-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 12 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Mireille Marcia Karman, S.Sos, M.Litt.

: 

Sekretaris

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Adi Kurniawan
NPM : 6091801175
Jurusan / Program studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah
di Turki dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb Model* (2015-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Desember 2021



Rizky Adi Kurniawan

ABSTRAK

Nama : Rizky Adi Kurniawan
NPM : 6091801175
Judul : Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb Model* (2015-2019)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Turki telah menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi asal Suriah dan bertransformasi menjadi negara penerima pengungsi baru. Dorongan untuk mengintegrasikan para pengungsi ini meningkat seiring dengan terjadinya fenomena *protracted refugee situation* (PRS) karena para pengungsi tidak dapat kembali ke negara asal maupun ingin bermukim kembali di negara ketiga. Selain itu, muncul permasalahan seperti kurang efektifnya kebijakan migrasi Turki dan terjadinya diskriminasi sosial maupun kekerasan yang dihadapi oleh para pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai "Bagaimana terjadinya proses integrasi pada pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2015-2019?". Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Integration Framework* dari Ager dan Strang untuk menjelaskan pemenuhan bidang-bidang integrasi seperti ketenagakerjaan, tempat tinggal, pendidikan, hak kesetaraan, koneksi sosial, pemahaman bahasa dan budaya lokal, serta keamanan dan stabilitas sosial yang dapat diakses dan dapat mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah. Bidang-bidang tersebut dipenuhi dan difasilitasi oleh berbagai aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951. Para aktor membentuk kerja sama kolaboratif yang dianalisis melalui *Cobweb Model* dari John Burton. Model tersebut menjelaskan interaksi antar aktor melalui program individu maupun kolaboratif serta kepentingan organisasi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi yang lebih baik. Berdasarkan analisis menggunakan *integration framework*, ditemukan bahwa proses integrasi pengungsi Suriah telah berjalan pada utamanya dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pemahaman budaya serta bahasa lokal. Namun, proses integrasi pada bidang lainnya masih terhambat oleh barrier seperti adanya stagnasi kebijakan, stigmatisasi, ancaman *refoulement*, dan kekerasan lokal. Demikian pula dengan analisis menggunakan *cobweb model* yang memperlihatkan bahwa Pemerintah Turki, OI, dan NGO masih memprioritaskan tiga bidang integrasi di atas untuk mendorong resiliensi para pengungsi Suriah, kemandirian ekonomi, dan interaksi sosial dengan masyarakat Turki.

Kata kunci: Proses integrasi pengungsi, pengungsi Suriah, *integration framework*, dan *cobweb model*.

ABSTRACT

Name : Rizky Adi Kurniawan
NPM : 6091801175
Title : *Analysis on the Integration Process of Syrian Refugees in Turkey with Integration Framework and Cobweb Model (2015-2019)*

In the last five years, Turkey has been hosting over 3,5 million Syrian refugees and transformed to become a newly refugee hosting country. The need to integrate these refugees arises considering the ongoing phenomenon of protracted refugee situation (PRS) since most of these refugees are unable to return home and do not intend to resettle in third countries. At the same time, Syrian refugees have been experiencing problem merging from the ineffectiveness of Turkish refugee policy to increasing social discrimination and violence against them. This research inquires "How does the Syrian refugee integration process happen in Turkey from 2015-2019?". To answer that, this research uses Ager and Strang's Integration Framework to explain the Syrian refugee integration process which explores important integration fields that are made accessible for the refugees such as employment, housing, education, rights of equality, social connection, local language and cultural knowledge as well as safety and social stability of the refugees in order to support their integration. Those fields are fulfilled and facilitated by actors such as the Turkish government, IOs, and NGOs in accordance with the 1951 Refugee Convention. They come with a collaborative partnership and are analysed through John Burton's Cobweb Model. The model explores interactions between those actors through individual or collaborative programmes and organizational interests which facilitate and push the Syrian refugees integration process forward. The analysis on the integration framework found that Syrian refugee integration has been working mostly on employment, education, and language and cultural knowledge fields while integration processes in other fields are still facing barriers of policy stagnation, stigmatization, threat of refoulement, and local violence. The application of cobweb model shows that the Turkish government, IOs, and NGOs are still prioritising those three integration fields to boost Syrian refugees' resiliency, economic independence, and social interaction with the Turkish society.

Keywords: Refugee integration process, Syrian refugees, integration framework, and cobweb model.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis terhadap Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki dengan Konsep *Integration Framework* dan *Cobweb Model* (2015-2019)". Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dan kriteria kelulusan pada jenjang Sarjana untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu hubungan internasional khususnya dalam lingkup kajian migrasi. Kajian ini sangatlah multidimensional dan dapat diobservasi berdasarkan pemberitaan sehari-hari. Namun, berbagai isu dalam kajian ini masih sering dimarjinalkan karena dianggap tidak semenarik kajian-kajian lainnya. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat membantu para peneliti lain yang ingin meneliti kajian yang sama khususnya terkait dengan proses integrasi pengungsi yang terjadi di negara berkembang. Selain itu, penulis masih jarang menemukan penelitian dalam lingkup kajian ini yang mencoba untuk menggunakan dua konsep yang berbeda seperti *integration framework* dan *cobweb model*. Dikarenakan tidak ada penelitian yang betul-betul sempurna, penulis mendorong agar peneliti lain dapat mengkritik dan mengembangkan hasil dari penelitian ini untuk tujuan akademik di masa mendatang.

Bandung, 16 Desember 2021



Rizky Adi Kurniawan

ACKNOWLEDGEMENTS

Bismillahi rahmani rahim,

I thank Allah The Almighty, with His grace, I could successfully finish this undergraduate thesis (skripsi) writing which marks the end of my undergraduate studying experience in Unpar's Department of International Relations. Throughout my 3,5 years time in Unpar, I have always found non-traditional securities – most notably refugee and other humanitarian issues, peace and conflict, as well as Europe and Middle Eastern issues to be interesting. During my second semester break, I had a chance to work as an educator volunteer in Turkey. While I taught local Turkish students on issues such as the UN SDGs and world diversity, I saw this negative phenomenon of discrimination and xenophobia against foreigners specifically Syrian and other Middle Eastern people due to socioeconomic and political changes in Turkey in the past few years. Then, I began my research on refugee issues while attending the English for International Relations course, started by small questions such as "Why do people in host countries hate refugees so much? Why are they getting a lot of discriminations while they came for peace and protection?". Yet, this issue is beyond that. There are aspects such as cooperation, management, and integration on forced migration that are also interesting to be looked upon.

This skripsi could not be done without the assistance and critical assessment of my supervisor, Ms. Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., PhD. – I will be forever indebted to her since she helped me through "ups-and-downs" during this skripsi writing. She is also an inspiring figure -- who is not only humble in sharing her expertise in migration issues with me but also has pushed my confidence in doing research. Other than that, I am privileged to be taught by professors such as Mr. Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D. – from whom I learnt about strategic thinking and organisational planning, Ms. Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt. – from whom I got motivated to read and learn since my very first semester in Unpar. Also, both of them happen to be my thesis examiners! And to Mr. Adrianus Harsawaskita, M.A. – from whom I learnt about Indonesia and foreign policy making, Mr. Giandi Kartasasmita, M.A. – from whom I became interested to learn international law and dispute settlements, and Mr. PANIP Satya, S.IP., M.Sc. – from whom I learnt and became very passionate about peace and conflict studies. All of them have motivated me to study, fix my grade, work harder, and even study higher. Thank you very much!

Besides thanking my supervisor and other professors, I also want to appreciate myself since I struggled quite a lot during my undergraduate experience. Prior to university, I had never experienced panic attacks, mental health struggles, getting ill (tipes, pusing kepala, etc.) due to assignments, and many more. I cannot believe that I could survive this life while having two internships – first at the Indonesian Ministry of Defence – and second at Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia while working in a youth-led NGO, AIESEC in Bandung for the past 3,5 years with tons of workloads. I should not and never underappreciated myself again.

Of course, I cannot survive university without my beloved friends who have always been supporting me no matter in which situation I was. To my confidants:

Rana Airlani, Stephany Lim, and Kinanti Aristawidya – thank you so much for being my trusted friends and discussion partners in many situations while being adventurous and wild at the same time. To my friends from the first semester in Unpar: Gevian Arif, Lely Bakti, Alya Diva, Levana Amaranti, Sandy Ilmi, Lassaya, Geri Ramadhani, Kevin Izzan, Naufal Hanif, Archangela Rachel, Ruth Latreia, Yemima "Jamie" Shania, Valencia, and Angelina de Yong – thank you so much for colouring up my university life and motivating me to get tons of opportunities ahead of me. To: Ibnu Haikal, Cyrilla Wangsadiputra, Salsabila Kusumastuti, Kezia Wattie, and others – thank you so much for entrusting me and have always been willing to "brainstorm" with me in academic and sometimes non-academic matters. To my seniors, which all of them happened to be Unpar for Harvard National Model United Nations alumni: Deandra Raryalaksmi, Wishnu Dharma, Jonathan Prasetyo, and Fransiska Andita – thank you so much for inspiring and helping me in various things especially in dealing with some personal, professional, or university-related matters. To anak-anak bimbingan Mbak Syl, especially Natasha Winona, Dinar Afina, and Sarah "June" Ferindita – thank you for your endless support and motivations so that I could continue and finish this skripsi.

I have other friends outside of Unpar to be thanked for such as Nabil Abdillah, Salma Oktaviani, and Tsaniya Suryana – who I grew up with and shared many beautiful memories with. To Sarah Atikanistha – thank you for our precious friendships since the 2nd NISC in 2016, we have grown a lot and shared a lot of things together. I am still waiting for your visit to Bandung! To Raisya Desiani, Ray Bassam, Faza Karima, and Haifa Rukanta – thank you for preserving our precious friendships and being my safe refuge since high school. Y también muchísimas gracias a mi mejor amiga, the future doctor, Denise Marinacci, whom I am lucky enough to meet through AFS Intercultura back in 2017 and become close friends ever since. I also send my warmest hugs and gratitude to Karin Winda and Raffi Syarif – my fellow anak sekolah negeri friends who also strive for success and accomplishing our big dreams – to become the next Indonesian changemakers. Also, thank you to my private Instagram friends who have been "calm enough" to watch my absurd daily life scenes.

To my friends in AIESEC in Bandung, thank you so much for your kind support and engagements. I am extremely lucky to be in this youth-led organisation where I met people who actually have changed my life. To Salsabilla Az Zahra, Nadia Sartika, Milzam Winarno, Zerlina Anabel, Prita Arifa, Fariz Aulia, Samuel Hasibuan, Liora Parulian, and Irena Suharti – thank you for giving me a chance to work and manage the Social Entrepreneurship and Environment Projects amidst the pandemic. I would have given up my position as Project Manager without all of you. I send my gratitude to my previous co-workers such as Rieszky Delfiero, Nadia Safira, Aldi "Mafer" Ferdiansyah, and Regina Nur who had helped me throughout my first and second year in the organisation. I also thank amazing people whom I met during —

— *the Myself My World Project with AIESEC in Eskişehir, Turkey such as Alas Durukan, Ahmet Durukan Bey, Serpil Durukan, Eren Yörüük, Buse Konar, Berrak Deniz, Berra Serin, Uras Elvi, Khandia Sari, Anindita Winandha, Omer Shakeel, Juan-Felipe Murillo Lopez, Rewan Abdelfathy, Yara Essam, Merhan Adel, Youmna Abdelhady, Azzam Araby, Dr. Houyem Hafdi, Dr. Mouna Hafdi, Avram Cristi, Maha Zairi, Armando Guerrero, Mauricio Almanza, Lis Camero, Arely Hernández, Fernanda Vega, Mateo Coronel, y también Nora Gómez-Mendoza y su familia en la Ciudad de México. Thank you for sharing some beautiful life journeys while also keeping our precious friendships until now. All of you have widened my perspective in understanding this issue and the sociopolitical situation in Turkey as well as in your home countries in general. Also, without all of you, my life experience would not be the same. I promise that someday I will visit all of you in your respective countries.*

I could not forget to mention the people at CSIS Indonesia. Not only have they been supporting me, they also have succeeded to keep my sanity throughout the end of 2021. I would like to extend my deepest gratitude to my supervisor and mentor, Mr. Muhammad Waffaa Kharisma, S.Sos., M.Sc., who have taught many things on research and analysis as well as being patient enough to supervise me. He had encouraged me to be brave, critical, and pushed me to get out of my comfort zone in doing research. Also, I want to thank my friends in the Centre especially Rania Teguh and Edwin Canggadibrata who have pretty much supported me with memes, playlists, scholarship and graduate school information, gossips, late night ZOOM calls, and more to keep me encouraged and loved.

To my big family members, I am nothing without all of you. To Papa and Mama, thank you for being so accepting of my personal decisions as well as keeping me encouraged and loved while finishing this skripsi. Thank you for feeding me with delicious food, teaching me how to be humble with others, and not forgetting our family roots. With your hard work, I could not be who I am today. Our family background is also related to this skripsi. With Papa being a part of a Chinese migrant community who migrated to Indonesia during the 1940s-1960s and Mama being an expatriate in the Middle East for more than 12 years, I have become very attached and sympathetic with migration-related issues to now. My highest gratitude also goes to my Bude and Pakde who have nurtured me since I was little – and their grandchildren, Anandita Safina and Abiel Hambali, who taught me many life lessons. And to the late Oma Greet Wessels-Beljaars, your repatriation stories from the Bersiap period have inspired me and will always be remembered.

Lastly, thank you to all my friends and colleagues in Indonesia and abroad who I could not mention one by one.

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ACKNOWLEDGMENTS</i>	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR DIAGRAM	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Deskripsi Masalah	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	13
1.2.3. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Kegunaan	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian	15
1.4. Kajian Literatur	15
1.5. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.1. Metode Penelitian	25
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	26
1.7. Sistematika Pembahasan	26
BAB 2	28
PENGUNGSI SURIAH DI TURKI	28
2.1. Kondisi Umum Pengungsi Suriah di Turki	28
2.2. Penjelasan Umum mengenai Kebijakan Negara Turki terhadap Para Pengungsi Suriah	34
2.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Para Pengungsi Suriah di Turki	38
2.3.1. Administrasi Kartu Tanda Penduduk (<i>Kimlik</i>) bagi Pengungsi Suriah	39
2.3.2. Rumitnya Akses Pengungsi Suriah terhadap Bantuan Sosial	40
2.3.3. Ancaman Pemulangan Paksa (<i>Refoulement</i>) oleh Otoritas Turki	42
2.3.4. Stigma Negatif Masyarakat Turki terhadap Pengungsi Suriah	43

BAB 3	47
AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES INTEGRASI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI	47
3.1. Aktor-Aktor Pemerintah	47
3.1.1. Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)	48
3.1.2. Directorate General for Migration Management (DGMM)	50
3.1.3. Aktor Pemerintah Turki Lainnya	51
3.2. Aktor-Aktor Non-Pemerintah	53
3.2.1. Turkish Red Cross (Turk Kızılay)	53
3.2.2. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)	55
3.2.3. International Organization for Migration (IOM)	57
3.2.4. United Nations Development Programme (UNDP)	58
3.2.5. Aktor-Aktor Non-Pemerintah Lainnya	60
 BAB 4	 65
ANALISIS TERHADAP PROSES INTEGRASI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI (2015-2019)	65
4.1. Memahami Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki dengan Konsep <i>Integration Framework</i>	65
4.1.1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi sebagai <i>Markers and Means</i> dalam Proses Integrasi	70
4.1.2. Stagnasi dalam Pemenuhan Hak Kesetaraan bagi Pengungsi Suriah sebagai <i>Foundation</i> dari Proses Integrasi	78
4.1.3. Menjajaki <i>Social Connection</i> antara Pengungsi dengan Kelompok Sesamanya, Masyarakat Lokal, dan Lembaga Pemerintah Turki	81
4.1.4. Upaya Mengurangi Barrier Integrasi melalui Program <i>Facilitators</i>	90
4.2. Interaksi antar Aktor yang Membantu Proses Integrasi yang Ditinjau melalui <i>Cobweb Model</i>	96
 BAB 5	 120
KESIMPULAN	120
 DAFTAR PUSTAKA	 122

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. *Cobweb Model* dari Para Aktor yang Terlibat dalam
Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki

101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sepuluh Provinsi Turki dengan Jumlah Pengungsi Suriah Terbanyak	32
Tabel 4.1. Analisis Proses Integrasi Pengungsi berdasarkan pada Indikator Ager dan Strang	68
Tabel 4.2. Hubungan Kerja Sama antara Aktor Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Proses Integrasi Pengungsi Suriah di Turki	102

DAFTAR SINGKATAN

3RP:	<i>Regional Refugee and Resilience Plan</i>
AFAD:	<i>Disaster and Emergency Management Presidency</i>
ALT:	<i>Adult Language Training Programme</i>
AS:	Amerika Serikat
CBI:	<i>Cash-based Interventions</i>
CCTE:	<i>Conditional Cash Transfer for Education</i>
CI:	<i>Caritas Internationalis</i>
DFA:	<i>Deniz Feneri Association</i>
DGMM:	<i>Directorate General for Migration Management</i>
EC:	<i>European Commission</i>
ECM:	<i>Emergency Cash Management</i>
ECRE:	<i>European Council on Refugees and Exile</i>
ESSN:	<i>Emergency Security Safety Net Programme</i>
FAO:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
HCA:	<i>Host Country Agreement</i>
HRW:	<i>Human Rights Watch</i>
ICMPD:	<i>International Centre for Migration Policy Department</i>
IDP:	<i>Internally Displaced Person</i>
IHH:	<i>Humanitarian Relief Foundation</i>
ILFL:	<i>International Labour Force Law</i>
İŞKUR:	<i>Turkish Employment Agency</i>
IOM:	<i>International Organizations for Migration</i>
KCC:	<i>Kızılay Cash Card</i>
LFIP:	<i>Law on Foreigners and International Protection</i>
MoE:	<i>Turkish Ministry of National Education</i>
MoLFSS:	<i>Turkish Ministry of Labour, Family, and Social Service</i>
MPST:	<i>Mobile Psychological Support Team</i>

NGO:	<i>Non-Governmental Organization</i>
OI:	Organisasi Internasional
PBB:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIKTES:	<i>Project on Promotion of Integration of Syrian Kids into The Turkish Education (PIKTES)</i>
PRS:	<i>Protracted refugee situation</i>
RWPFTP:	<i>Regulation on Work Permits for Foreigners under Temporary Protection</i>
SF:	<i>Syria Forum</i>
SCR2P:	<i>Syrian Crisis Response and Resilience Programme</i>
SGBV:	<i>Sexual and Gender-based Violence</i>
TBMM:	<i>Turkish Grand National Assembly</i>
TK:	<i>Türk Kızılay</i>
TPR:	<i>Temporary Protection Regulation</i>
UE:	Uni Eropa
UMKM:	Usaha mikro, kecil, dan menengah
UMR:	Upah minimum rata-rata
UNDP:	<i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR:	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNICEF:	<i>United Nations Children's Fund</i>
UNOCHA:	<i>United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
UNWOMEN:	<i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
UU:	Undang-Undang
WFP:	<i>World Food Programme</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi merupakan suatu permasalahan internasional yang masih dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Apabila merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pengungsi merupakan sekelompok orang yang terpaksa pergi mencari perlindungan ke luar negeri karena terjadinya konflik dan kekerasan di negara asalnya.¹ Sementara itu, apabila merujuk pada Konvensi Pengungsi 1951, seseorang dapat dikatakan sebagai pengungsi apabila ia tidak dapat kembali ke negara asalnya dikarenakan rasa takut akan persekusi yang dapat terjadi padanya karena adanya perbedaan ras, kepercayaan, kewarganegaraan, kelompok sosial, maupun perbedaan opini politik.²

UNHCR menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 80 juta orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya dikarenakan instabilitas keamanan yang terjadi di negaranya.³ Data yang sama juga menyatakan bahwa terdapat sebanyak 45,7 juta pengungsi internal (*internally displaced person (IDP)*) dan 26,3 juta orang yang terpaksa mengungsi ke negara lain. Sebanyak $\frac{2}{3}$ dari total pengungsi yang tersebar di seluruh dunia berasal dari 5 negara yang sedang berkonflik, termasuk Suriah.⁴ Sebagian besar dari para pengungsi ditampung oleh negara-negara yang memiliki

¹ UNHCR, "What Is a Refugee?", terakhir diakses pada Mei 2021, <https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html>.

² UNHCR Communications and Public Information Service, "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees", terakhir diakses pada tanggal 14 April 2021.

³ UNHCR, "Refugee Statistics", Refugee Data Finder, terakhir diakses pada Mei 2021, <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

⁴ Ibid, berdasarkan data yang terakhir diakses pada Mei 2021. Sebanyak 6,6 juta pengungsi berasal dari Suriah dan disusul oleh Venezuela dengan 3,7 juta pengungsi, Afghanistan dengan 2,7 juta pengungsi, Sudan Selatan dengan 2,3 juta pengungsi serta Myanmar dengan 1 juta pengungsi.

kedekatan letak geografis dengan negara asalnya. Negara-negara seperti Turki, Kolombia, Pakistan, Uganda, dan Jerman telah menampung sebanyak 39% dari total angka pengungsi global. Empat dari negara penerima tersebut merupakan negara-negara berkembang.⁵ Umumnya, pemerintah dari negara-negara tersebut telah melakukan berbagai upaya kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi krisis kemanusiaan ini.

Memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi sudah seharusnya dijadikan norma bagi komunitas internasional. Bantuan dari suatu negara dianggap penting dikarenakan pengungsi merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan dihadapi oleh permasalahan seperti halnya eksklusi sosial. Permasalahan eksklusi sosial tidak dapat diselesaikan melalui pemberian bantuan finansial secara langsung terhadap para pengungsi saja. Penting bagi negara untuk memberikan akses terhadap fasilitas sosial yang semestinya terhadap para pengungsi dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dasar (*basic needs*). Sehingga, negara penerima harus dapat memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi seperti dalam sektor kesehatan, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan sosial.⁶

Adapun langkah lain yang dapat dilakukan oleh negara dalam menangani kedatangan pengungsi adalah mengintegrasikan kelompok pengungsi dengan masyarakat lokal. Menurut Ager dan Strang, integrasi merupakan proses dari suatu

⁵ Ibid.

⁶ UNHCR, "Basic Need Approach in the Refugee Response", terakhir diakses pada Mei 2021, <https://www.unhcr.org/protection/operations/590aefc77/basic-needs-approach-refugee-response.html>. UNHCR menganggap bahwa pemenuhan *basic needs* akan berpengaruh pada survivabilitas para pengungsi di negara penampung. Sebagai kelompok masyarakat yang rentan akan bahaya, pengungsi harus difasilitasi kebutuhannya sebagai bagian dari perlindungan dan mendukung adanya peningkatan produktivitas setempat sehingga memudahkan pembentukan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

individu atau kelompok dalam berpartisipasi dan menjadi bagian dari masyarakat tertentu tanpa harus melepaskan identitas budaya asal dari kelompoknya.⁷ Proses integrasi merupakan hal yang penting karena tidak ada satupun pihak yang dapat mengetahui kapan suatu konflik akan berhenti sehingga para pengungsi dapat kembali ke negaranya. Selain dengan membentuk kebijakan tertentu, negara penerima dapat memberikan fasilitas dan materi belajar bagi para pengungsi khususnya dalam hal pendidikan bahasa dan budaya, peningkatan kemampuan (*skill*) bekerja, dan bantuan penting lainnya sebagai bagian dari proses integrasi.⁸

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa proses integrasi dapat terjadi sebagai suatu fenomena natural yang dapat berjalan di suatu negara. Hal ini dapat terjadi di negara penerima yang memiliki jumlah pengungsi lebih dari 25,000 dalam waktu lebih dari 5 tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena integrasi merupakan suatu proses dua jalur melalui interaksi sosial yang melibatkan para pengungsi dengan masyarakat lokal.⁹ Masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan dalam proses integrasi. Interaksi sosial antara kedua kelompok tersebut dapat mengurangi adanya hambatan (*barrier*) dalam bersosialisasi dengan satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kerja sama antar aktor dalam mendukung proses integrasi pengungsi yang baik. Kerja sama antar aktor ditekankan

⁷ Alastair Ager dan Alison Strang, *Understanding Integration: A Conceptual Framework*, *Journal of Refugee Studies* Vol 21 No 2, Oxford University Press, 17 April 2008, hal.166-191; dan Michaela Hynie, *Refugee Integration: Research and Policy*, *Peace and Conflict Journal of Peace Psychology*, Vol 24, No 23, *American Psychological Association*, Agustus 2018, hal.265-276.

⁸ Michaela Hynie, *Ibid*.

⁹ Alastair Ager dan Alison Strang, hal.182. Ager dan Strang menemukan bahwa interaksi antara kedua kelompok tersebut harus dijumpai oleh aktor lainnya (seperti badan lokal atau organisasi yang terlibat dalam pemenuhan hak para pengungsi) dengan terlebih dahulu menyediakan fasilitas komunikasi seperti bantuan terjemahan dan pelatihan bahasa lokal bagi para pengungsi.

pada bagaimana pemerintah, organisasi internasional (OI), dan masyarakat sipil dapat mengambil peran dan membentuk pola interaksi yang dapat membantu jalannya proses integrasi. Hal ini menyikapi pada proses integrasi yang sangat abstrak dan kompleks dengan berbagai dinamika dan indikator yang dapat menentukan kesuksesannya. Penelitian ini menekankan pada proses integrasi pengungsi Suriah di negara Turki yang didorong melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta interaksi antara para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO yang memfasilitasi proses integrasi. Turki merupakan negara penerima pengungsi Suriah terbanyak di dunia dalam 5 tahun terakhir. Seiring dengan tingginya angka pengungsi Suriah di Turki, aktor pemerintah dan non-pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin stabilitas kehidupan para pengungsi. Langkah-langkah tersebut meliputi pada pemberian hak maupun bantuan bagi para pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Saat ini, sudah terdapat *Convention and Protocol relating to the Status of Refugees* (Konvensi Pengungsi 1951) yang telah ditandatangani oleh 145 negara dan menjadi dasar hukum internasional utama yang mengatur negara penerima (*receiving state*) untuk melindungi serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh para pengungsi yang ada di negaranya.¹⁰ Terdapat tiga prinsip utama yang

¹⁰ UNHCR, "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees"; dan UNHCR, "Introductory Note by the Office of the UNHCR", *Convention and Protocol relating to the Status of Refugees*, hal.2-5. *Note*: Pertama, prinsip *non-discrimination* melarang negara penerima untuk memberlakukan segala bentuk diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi dalam konvensi ini terlepas dari perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, pandangan politik, dan lain sebagainya. Kedua, prinsip *non-penalisation* yang melarang adanya pemberian hukuman terhadap para pengungsi yang masuk dan tinggal di suatu negara secara ilegal. Aturan ini memperbolehkan pengungsi untuk melanggar beberapa aturan imigrasi yang berlaku di suatu negara. Ketiga,

terkandung dalam konvensi ini yaitu *non-discrimination*, *non-penalisation*, dan *non-refoulement*. Sehingga, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini seharusnya dapat melakukan kewajibannya dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi termasuk melalui upaya integrasi. Konvensi ini juga secara implisit mendukung terjadinya proses integrasi pengungsi di negara penampung karena tertulisnya berbagai hak yang dimiliki oleh pengungsi seperti hak terhadap akses dan bantuan hukum, pekerjaan yang layak, bantuan sosial, tempat tinggal, dan pendidikan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara penerima.

Namun, terdapat tren di antara negara penandatangan konvensi yang menutup diri dari kedatangan para pengungsi serta membatasi ruang bagi para pengungsi untuk berintegrasi menjadi bagian dari masyarakat negara setempat. Saat ini, banyak negara yang belum dapat mengimplementasikan tiga nilai dari konvensi di atas, termasuk Turki. Sering kali, proses integrasi pengungsi di negara penerima terhambat permasalahan seperti ketidaksinkronan antara aturan nasional dan proses implementasinya dalam menangani kehadiran para pengungsi. Sehingga, timbul berbagai penolakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap para pengungsi.¹¹

prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini merupakan aturan paling penting sehingga tidak ada satupun negara yang boleh melakukan reservasi terhadap aturan ini. Prinsip ini melarang negara penerima untuk mengembalikan para pengungsi, secara paksaan maupun tidak, ke negara asalnya.

¹¹ Jonas Ekblom, "Poland, Hungary Broke EU Laws by Refusing to Host Migrants: Court Adviser" (Reuters, October 31, 2019), terakhir diakses pada tanggal 14 April 2021, <https://www.reuters.com/article/us-europe-migration-court-idUSKBN1XA1S5>; dan "Hungary, Poland and Czech Republic Broke EU Law on Refugees, Says Court Adviser: DW: 31.10.2019" (Deutsche Welle, October 31, 2019), <https://www.dw.com/en/hungary-poland-and-czech-republic-broke-eu-law-on-refugees-says-court-adviser/a-51070632>.

Penanganan krisis pengungsi melalui upaya integrasi telah dilakukan oleh beberapa negara penerima pengungsi. Penulis menggunakan data dari penelitian yang membandingkan kendala dari proses integrasi di Eropa Barat, Kanada, dan Amerika Serikat (AS) dari Donato dan Ferris.¹² Dalam upaya mengintegrasikan para pengungsi menjadi bagian dari masyarakat lokal, negara-negara tersebut menemukan kendala yang hampir sama seperti keterbatasan bahasa dan kompetensi kerja dari para pengungsi. Contohnya, dalam proses integrasi pengungsi yang terjadi di Belanda, kompetensi kerja dan kemampuan berbahasa lokal masih menghambat para pengungsi untuk berintegrasi. Sementara itu, proses integrasi pengungsi di negara seperti AS cenderung terkendala oleh terbatasnya hak sipil bagi para pengungsi. Hal tersebut dinilai dapat menghambat proses integrasi pengungsi asing dalam jangka panjang.

Proses integrasi pengungsi juga terjadi di negara berkembang seperti Turki. Belakangan ini, Turki telah bertransformasi menjadi sebuah *hybrid regime* yang cenderung bersikap otoriter.¹³ Namun, Ankara sering kali mencoba untuk menunjukkan itikad baiknya kepada komunitas internasional untuk menciptakan citra positif salah satunya dengan cara menampung dan memfasilitasi para pengungsi Suriah yang ada di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan

¹² Katherine M. Donato dan Elizabeth Ferris, Refugee Integration in Canada, Europe, and the United States, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 690, Issue 01, 2020, hal.7-35, doi: <https://doi.org/10.1177/0002716220943169>. Kedua kemampuan tersebut juga berdampak pada peningkatan peluang bagi para pengungsi untuk menjalin hubungan baik dengan pekerja lokal yang turut menjadi salah satu faktor kesuksesan upaya integrasi yang dilaksanakan oleh suatu negara.

¹³ Nikolaos Stelgias, "Turkey's Hybrid Competitive Authoritarian Regime A Genuine Product Of Anatolia's Middle Class" (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, 2015), http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/02/60_2015_-WORKING-PAPER-_Nikolaos-Stelgias-1.pdf; dan Jean-François Gagné, "Hybrid Regimes" (The Oxford Bibliographies, May 2, 2019), <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0167.xml>; *hybrid regimes* merupakan suatu terminologi yang dikembangkan oleh Jean François-Gagné yang merujuk pada karakteristik negara yang sistem pemerintahannya menggabungkan nilai-nilai demokratis dan otokrasi. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki karakteristik ini ditandai dengan adanya pemilihan umum dan perlindungan pada hak-hak masyarakat sipil namun kondisi seperti persaingan politik yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi.

implementasi kebijakan buka pintu (*open door policy*) bagi para pengungsi yang mencari perlindungan sejak awal terjadinya konflik di Suriah. Kebijakan ini didukung penuh oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan para pejabat tinggi Turki lainnya.¹⁴ Langkah ini juga sejalan dengan posisi Turki sebagai negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951.

Namun, proses integrasi pengungsi yang terjadi di Turki dapat dikatakan cukup berbeda dengan yang telah terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Hal ini karena posisi geografis Turki yang secara langsung berbatasan dengan Suriah sehingga turut terdampak langsung oleh krisis kemanusiaan yang terjadi di negara tetangganya. Konsekuensinya, Pemerintah Turki, organisasi internasional (OI), serta *non-governmental organization* (NGO) harus berperan aktif dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara membangun relasi yang baik antara satu sama lain dan menjembatani interaksi antara para pengungsi, masyarakat, dan pemerintah lokal. Sehingga, timbul suatu dinamika interaksi antar aktor yang memengaruhi proses integrasi pengungsi di Turki. Di sisi lain, OI dan NGO memiliki peran yang amat krusial dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan penyediaan berbagai jasa bagi para pengungsi yang melengkapi bantuan yang telah diberikan oleh aktor negara.¹⁵

¹⁴ “Syrians in Turkey: Special Report 2018”, Ombudsman Institution of the Republic of Turkey, 2018, hal.6-7; Gülay Uğur Göksel, “Integration of Syrian Refugees in Turkey”, *Integration of Immigrants and the Theory of Recognition* (25 October 2017), hal.155-156.

¹⁵ Ulaş Sunata and Salih Tosun, “Assessing the Civil Society’s Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a New Typology,” *Journal of Refugee Studies* 32, no. 4 (2018): pp. 683-703, <https://doi.org/10.1093/jrs/fev047>.; dan Bülent Aras and Yasin Duman, “I/Ngos’ Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Opportunities and Challenges,” *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 21, no. 4 (2018): pp. 478-491, <https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1530382>. Peran dan bantuan yang ditawarkan oleh OI dan NGO mendorong terjadinya proses integrasi para pengungsi dari lingkup masyarakat akar rumput (*grass-root level*). OI dan NGO sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki peran dalam pemenuhan bidang-bidang yang terdapat dalam *integration framework*-nya Ager dan Strang.

Dalam penelitian ini, OI dan NGO bersifat saling melengkapi peran pemerintah dalam memberikan bantuan bagi para pengungsi Suriah.

Selain itu, terlepas dari karakteristiknya sebagai "negara transit", lebih banyak pengungsi Suriah yang memutuskan untuk tinggal menetap di Turki dibandingkan mereka yang ingin menyebrang ke wilayah UE, AS, dan Kanada.¹⁶ Sehingga, dapat dikatakan bahwa Turki telah berubah menjadi negara penerima pengungsi baru. Selain itu, istilah "negara transit" masih sering diperdebatkan oleh kalangan akademisi dan organisasi internasional. Hal ini amat erat kaitannya dengan definisi dari negara transit yang ditentukan oleh jumlah waktu yang dihabiskan di para pengungsi sebelum akhirnya berpindah ke "negara tujuan". Sementara itu, OI seperti UNHCR tidak memiliki jangka waktu untuk mengkalkulasikan durasi pengungsi di "negara transit" maupun definisi yang jelas terkait dengan *transit migration*.

Adapun mayoritas pengungsi Suriah di Turki tidak tinggal di penampungan pengungsi yang disediakan oleh pemerintah setempat dan organisasi internasional. UNHCR menyatakan bahwa 98% pengungsi Suriah di Turki tinggal dengan bebas di luar penampungan pengungsi sementara.¹⁷ Banyak pengungsi yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan para pengungsi lainnya dan menyewa apartemen di perkotaan besar seperti Istanbul dan Ankara.¹⁸ Dengan kondisi seperti ini, para pengungsi dapat mencari lapangan

¹⁶ "Key Migration Terms" (International Organization for Migration), accessed November 12, 2021, <https://www.iom.int/key-migration-terms>.; Negara transit diartikan IOM sebagai negara yang dilewati oleh para pengungsi sebelum ke negara destinasi yang dituju atau dari negara yang dituju ke negara asal. Dalam kasus lain, PBB sendiri tidak memiliki kejelasan dalam mengkalkulasikan waktu yang dihabiskan para pengungsi di negara transit sehingga menjadikan negara tersebut sebagai negara destinasi.

¹⁷ "Turkey Fact Sheet, October 2019", UNHCR.

¹⁸ Franck Düvell, "Turkey, the Syrian Refugee Crisis and Changing Dynamics of Transit Migration," in *Mediterranean Yearbook* (European Institute of the Mediterranean, 2013).

pekerjaan meskipun pada faktanya hanya 1,5% dari mereka yang memiliki izin kerja resmi dari Pemerintah Turki. Konsekuensinya, banyak para pengungsi Suriah yang tidak memiliki izin kerja yang memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan dalam sektor informal yang rentan mendapatkan kondisi kerja yang tidak layak dan upah di bawah UMR.¹⁹

Turki juga merupakan negara penerima pengungsi Suriah terbanyak sejak tahun 2015. Terdapat sekitar 3,412,368 pengungsi Suriah dalam status *temporary protection* pada tahun 2017.²⁰ Dua tahun kemudian, angka pengungsi naik menjadi 3,6 juta.²¹ Berkaitan dengan persoalan di atas, Ombudsman Turki telah memprediksi adanya lonjakan kedatangan pengungsi Suriah ke Turki. Sehingga, pihaknya tengah mempersiapkan solusi kebijakan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.²² Kenaikan ini juga mendorong Ankara untuk mengeluarkan kebijakan khusus seperti pemberian hak jaminan sosial yang kurang lebih serupa dengan hak yang dimiliki oleh warga lokal dan pembentukan aturan hukum termasuk *temporary protection* bagi para pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi. Meskipun begitu, Pemerintah Turki belum memiliki kebijakan imigrasi yang eksplisit sehingga memberikan ketidakpastian bagi para pengungsi.

Berkaitan dengan pemberian status *temporary protection* bagi para pengungsi Suriah, para pengungsi diperbolehkan mengakses kebutuhan dasar

¹⁹ "A New Policy to Better Integrate Refugees into Host-Country Labor Markets," ReliefWeb (CGDev, November 25, 2019), <https://reliefweb.int/report/turkey/new-policy-better-integrate-refugees-host-country-labor-markets>.

²⁰ "Syrians in Turkey: Special Report 2018", hal.26.

²¹ UNHCR, "Turkey Fact Sheet, October 2019".

²² Alan Makovsky, "Turkey's Refugee Dilemma: Tiptoeing towards Integration", *Center for American Progress*, March 2019, hal.1-39.

(*basic needs*), dokumen identitas, izin kerja, bantuan sosial, dan pendidikan yang diberikan oleh otoritas Turki.²³ Status ini diatur dalam peraturan *Temporary Protection Regulation (TPR)*.²⁴ Namun, Ankara belum dapat memenuhi hak dari para pengungsi Suriah yang dibuktikan oleh hadirnya permasalahan dasar seperti pada pengurusan dokumen dan perizinan bagi para pengungsi. Dalam hal ini, pengungsi Suriah harus memiliki kartu tanda penduduk (*kimlik*) yang berfungsi sebagai syarat untuk mengakses fasilitas sosial yang kurang lebih sama seperti masyarakat Turki pada umumnya. Namun, proses mendapatkan *kimlik* sering kali dianggap membingungkan.²⁵ Para pengungsi sering kali merasa kesulitan untuk mendapatkan *kimlik* karena terhambat oleh kemampuan bahasa Turki yang terbatas. Dalam mengatasi permasalahan ini, OI dan NGO berperan penting dalam membantu proses registrasi *kimlik* dan menjembatani komunikasi antara para pengungsi dengan lembaga setempat yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembuatan *kimlik* dan izin kerja bagi para pengungsi.²⁶

Selain itu, Ankara juga telah membentuk beberapa peraturan khusus mengenai perlindungan dan hak pekerjaan bagi warga negara asing yang ada di negaranya. Peraturan tersebut meliputi *Law on Foreigners and International Protection (LFIP) 2013*, *Regulation on Work Permits for Regulation on Work Permits for Foreigners under Temporary Protection (RWPFTP) 2016*, dan

²³ "Refugee Law and Policy: Turkey", Legal Reports, The United States Library of Congress, terakhir diakses pada tanggal 20 April 2021, <https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/turkey.php>.

²⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, "Turkey: Temporary Protection Regulation," Refworld (Government of Turkey), accessed December 11, 2021, <https://www.refworld.org/docid/56572fd74.html>.

²⁵ Baban, Ilcan, dan Rygiel, 2016.

²⁶ Bülent Aras and Yasin Duman, "I/NGOs' Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Opportunities and Challenges," *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 21, no. 4 (2018): pp. 478-491, <https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1530382>

*International Labour Force Law (ILFL) 2016.*²⁷ Aturan tersebut dibentuk untuk menyerap para pengungsi ke dalam pasar kerja nasional, khususnya pada sektor formal. Secara implisit, ketiga aturan tersebut dinilai oleh para sarjana dapat mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi yang lebih masif di Turki. Namun, implementasi dari aturan-aturan di atas belum berlangsung dengan baik sehingga memunculkan beragam permasalahan dalam proses integrasi pengungsi.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh para pengungsi Suriah di Turki adalah diskriminasi sosial. Permasalahan ini merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi di negara-negara penerima pengungsi. Dalam hal ini, diskriminasi sosial terhadap para pengungsi dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat lokal mengenai kebijakan dapat mendorong terjadinya integrasi (contoh: LFIP, RWPFTP, ILFL, dan *temporary protection status*). Hal ini dibuktikan melalui persepsi masyarakat setempat yang cenderung negatif terhadap eksistensi para pengungsi Suriah di negaranya.²⁸ Diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap para pengungsi. Tetapi, diskriminasi juga dilakukan secara sistemik oleh aparat keamanan setempat. Beberapa anggota dari aparat keamanan dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan dan mendeportasi para pengungsi secara paksa ke Suriah.²⁹

²⁷ Ahmet İçduygu dan Dogus Simsek, "Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies", *Turkish Policy Quarterly Fall 2016*, 63-64.

²⁸ International Crisis Group, "Turkey's Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions," *International Crisis Group Europe Report*, No. 248 (January 29, 2018): pp. 1-22; Makovsky, 2019.

²⁹ Umar Farooq and Nabih Bulos, "Anti-Refugee Sentiment Grows in Turkey as Government Begins to Send Syrians Back" (The Los Angeles Times, July 25, 2019), terakhir diakses pada Agustus 2021 <https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-07-25/turkey-shows-signs-of-exasperation-over-refugees>.

Proses integrasi amat penting untuk didorong oleh para aktor mengingat kecilnya peluang bagi para pengungsi Suriah untuk kembali ke negaranya.³⁰ Proses ini juga dilakukan untuk mencegah resiko yang ditimbulkan oleh adanya *protracted refugee situation* (PRS) seiring dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi Suriah yang datang ke Turki.³¹ Namun, kebijakan dan bantuan yang dibentuk oleh Ankara sering kali tidak konsisten sehingga menimbulkan polemik ataupun permasalahan lainnya yang dapat menghambat proses integrasi pengungsi. Sehingga, proses integrasi harus melibatkan kerja sama antara Pemerintah Turki dengan aktor-aktor lainnya seperti OI dan NGO. Para aktor tersebut berperan penting dalam memfasilitasi proses integrasi pengungsi melalui penyaluran bantuan serta pembentukan program sosial yang menjembatani interaksi antara para pengungsi dan masyarakat lokal.³²

Berdasarkan pada paparan di atas, hal yang paling menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses integrasi pengungsi Suriah terjadi di Turki berdasarkan pada proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi. Proses tersebut masih terkendala oleh adanya barrier seperti diskriminasi sosial, implementasi dari UU seperti RWPFTP dan ILFL yang belum sepenuhnya efektif dalam menjaring para pengungsi untuk terintegrasi pada bidang ketenagakerjaan, dan keterbatasan bahasa lokal yang membuat para pengungsi kesulitan dalam proses administrasi dokumen seperti *kimlik* maupun mengakses

³⁰ Feyzi Baban, Suzan Ilcan, dan Kim Rygiel, Syrian Refugees in Turkey: Pathways to precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2016, hal.1-17, <http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2016.1192996>.

³¹ UN Refugees, "Protracted Refugee Situations Explained", 28 Januari 2020, terakhir diakses pada Agustus 2021, <https://www.unrefugees.org/news/protracted-refugee-situations-explained/>.

³² Ulaş Sunata and Salih Tosun, "Assessing the Civil Society's Role in Refugee Integration in Turkey: NGO-R as a New Typology," *Journal of Refugee Studies* 32, no. 4 (2018): pp. 683-703, <https://doi.org/10.1093/jrs/fey047>.

bantuan lainnya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pengungsi juga difasilitasi oleh bantuan dari para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengungsi dan interaksi dari para aktor melalui kerja sama dan berbagai program bantuan bagi para pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Sadar akan luasnya cakupan penelitian dalam kajian migrasi – termasuk mengenai proses integrasi pengungsi, diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari adanya redundansi dalam penelitian ini. Pembatasan masalah meliputi pada rentang waktu penelitian, aktor, dan indikator dalam proses integrasi. Penulis membatasi waktu penelitian mengenai proses integrasi pengungsi Suriah di Turki ini dari tahun 2015-2019. Pada rentang tahun tersebut, terjadi pembentukan kebijakan pengungsian baru sekaligus kenaikan jumlah pengungsi yang signifikan.³³ Penelitian ini juga hanya menggunakan empat indikator seperti *markers and means*, *foundations*, *social connections*, dan *facilitators* dari konsep *integration framework* yang dikembangkan oleh Ager dan Strang untuk mengetahui terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini juga menggunakan *cobweb model* dalam menganalisis proses integrasi pengungsi yang difasilitasi oleh aktor pemerintah dan non-pemerintah (OI dan NGO). *Cobweb model* digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara para aktor yang

³³ “Syrians in Turkey: Special Report 2018”, hal.27.

terjadi akibat adanya kerja sama, kesamaan pandangan, maupun program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi yang sesuai dengan empat indikator *integration framework* yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menarik perumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu **"Bagaimana terjadinya proses integrasi pada pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2015-2019?"**

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses integrasi pengungsi Suriah yang terjadi di Turki. Dalam hal ini, penelitian ini ingin melihat mengenai proses integrasi pengungsi Suriah yang dibantu melalui program dari para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO pada tahun 2015-2019. Peneliti juga ingin melengkapi kekurangan dari berbagai penelitian serupa yang umumnya hanya berfokus pada proses integrasi dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan saja. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengaplikasikan *integration framework* dan *cobweb model* yang pembahasannya masih amat jarang ditemukan dalam berbagai penelitian yang terkait proses integrasi pengungsi Suriah di Turki.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam kajian kepustakaan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam lingkup kajian kemanusiaan, migrasi, dan kawasan Timur Tengah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah contoh penelitian yang menerapkan konsep *integration framework* dan *cobweb model* dalam kasus integrasi pengungsi. Dalam hal ini, penulis ingin membantu para peneliti lain yang sedang mengkaji penelitian yang sama dalam hal penanganan pengungsi di negara penerima maupun kerja sama multi aktor dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dalam upaya integrasi pengungsi. Sadar akan segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis berharap agar peneliti lain dapat mengkritisi dan mengembangkan hasil temuan dalam penelitian ini sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam penelitian lainnya di masa mendatang.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, kajian literatur berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai topik penelitian berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian literatur juga digunakan untuk menjelaskan alur penelitian ini secara implisit. Terdapat tiga tulisan yang mengangkat isu hukum, ketenagakerjaan, dan pendidikan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Literatur pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmet İçduygu dan Doğu Şimşek yang

membahas mengenai perkembangan peraturan nasional Turki dalam merespon lonjakan kedatangan pengungsi Suriah sejak tahun 2011.³⁴ Pada tahun 2014, Ankara menerbitkan UU bagi Orang Asing dan Perlindungan Internasional (LFIP) yang belum dapat meningkatkan proses integrasi pengungsi dalam pasar kerja nasional. Kemudian, Ankara menerbitkan dua UU pada tahun 2016. UU pertama adalah *Regulation on Work Permits for Foreigners under Temporary Protection (RWPFTP)* yang mengatur izin kerja bagi orang asing dalam status *temporary protection*. RWPFTP juga membahas mengenai *affirmative action* berupa besaran alokasi penyerapan tenaga pengungsi terhadap pasar kerja nasional sebesar 10%. UU kedua adalah *International Labour Force Law (ILFL)* yang bertujuan untuk menjaring imigran dan pengungsi berkemampuan tinggi ke dalam pasar kerja nasional.³⁵

Literatur kedua adalah sebuah bab buku yang ditulis oleh Gülay Uğur Göksel yang membahas mengenai berbagai permasalahan dalam proses integrasi pengungsi Suriah dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan.³⁶ Göksel menjelaskan bahwa Turki telah menjadi negara penerima pengungsi baru sehingga perlu adanya perubahan dalam aturan hukum domestik yang menjamin adanya perlindungan dan kesempatan bagi pengungsi Suriah untuk berintegrasi melalui penyerapan tenaga kerja. Aturan hukum kontemporer seperti RWPFTP dan ILFL dianggap belum dapat membawa perubahan yang signifikan karena masih sedikitnya angka pengungsi Suriah yang

³⁴ Ahmet İcduygu dan Dogus Simsek, "Syrian Refugees in Turkey: Towards Integration Policies", *Turkish Policy Quarterly Fall 2016*, 59-69. Pertama, UU RWPFTP mengatur proses integrasi pengungsi dalam pasar kerja domestik melalui jaminan gaji UMR dan *affirmative action* dalam penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2016.

³⁵ İcduygu dan Simsek, Ibid. RWPFTP dan ILFL dinilai berdampak terhadap peningkatan jumlah pengungsi dalam pasar kerja nasional yang secara langsung memengaruhi proses integrasi dalam bidang lainnya seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

³⁶ Gülay Uğur Göksel, "Integration of Syrian Refugees in Turkey", *Integration of Immigrants and the Theory of Recognition* (25 October 2017), 145-175.

terserap dalam lapangan kerja formal.³⁷ Selain itu, masyarakat Turki menganggap eksistensi para pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan dan aktivitas perekonomian setempat. Apabila Ankara tidak kunjung mengeluarkan kebijakan integrasi, para pengungsi terancam mengalami permasalahan yang sama dan dapat berujung pada semakin kompleksnya PRS karena semakin banyaknya jumlah pengungsi yang berlindung di Turki.

Literatur ketiga adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Hasan Aydin, Mahmut Gündoğdu, dan Arif Akgul.³⁸ Artikel ini melihat pada persepsi tenaga pengajar Turki, selaku masyarakat penerima, terhadap partisipasi anak-anak pengungsi Suriah dalam proses pendidikan. Artikel ini menggarisbawahi pada adanya urgensi untuk mengintegrasikan anak-anak pengungsi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesiapan tenaga pengajar melalui pelatihan pendidikan multikultural, proses penyampaian materi secara *bilingual*, dan pembentukan kurikulum khusus dianggap sebagai hal yang krusial untuk mencapai kesuksesan dari implementasi upaya integrasi siswa pengungsi ke dalam pendidikan nasional. Ankara telah memiliki rencana untuk mengintegrasikan anak-anak pengungsi ke dalam sistem pendidikan nasional pada tahun 2020. Namun, angka anak-anak pengungsi (terutama yang tinggal di luar

³⁷ Göksel, Ibid. Pengungsi Suriah juga masih dihadapkan oleh kendala bahasa dan kualifikasi pekerjaan sehingga tidak dapat terserap dalam pasar kerja melalui aturan seperti ILFL.

³⁸ Hasan Aydin, Mahmut Gündoğdu, dan Arif Akgul, Integration of Syrian Refugees in Turkey: Understanding the Educators' Perception, *Journal of International Migration and Integration* (04 January 2019), hal.1-12. Penelitian dalam artikel jurnal ini dilakukan melalui proses wawancara terhadap 353 tenaga pengajar di Turki. Wawancara dilakukan untuk mengetahui perspektif dari para pengajar mengenai sikap, ketersediaan, dan permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan hadirnya anak-anak pengungsi di sekolah formal. Selain itu, para pengajar juga merasa bahwa mereka belum dibekali persiapan yang memadai untuk mengajar anak-anak pengungsi oleh Pemerintah Turki.

penampungan) yang terdaftar dalam sistem pendidikan formal masih sangat sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di penampungan pengungsi.

Berdasarkan observasi dan analisis penulis terhadap tiga karya literatur di atas dan karya literatur lainnya, ditemukan bahwa banyak literatur mengenai integrasi yang hanya mengedepankan bidang hukum dan ketenagakerjaan bagi para pengungsi. Kedua bidang tersebut sering kali dijadikan indikator dalam menentukan kesuksesan proses integrasi yang dilakukan oleh suatu negara. Namun, dua bidang tersebut tidak cukup untuk digunakan dalam melihat kemajuan dari upaya integrasi pengungsi. Hal ini disebabkan karena proses integrasi merupakan proses yang harus berjalan setidaknya secara dua jalur (*two-way*) karena melibatkan interaksi antara para pengungsi dan masyarakat lokal, multidimensional, dan memiliki bidang lain yang penting untuk diteliti lebih lanjut seperti tempat tinggal, pemahaman bahasa dan budaya lokal, keamanan dan stabilitas para pengungsi, dan interaksi antara pengungsi dan masyarakat serta lembaga pemerintahan di negara setempat. Sehingga, cakupan dalam penelitian ini diperluas dengan tidak hanya mendiskusikan bidang hukum dan ketenagakerjaan saja untuk mengetahui proses integrasi yang terjadi pada para pengungsi Suriah di Turki. Hal ini juga dibahas secara lebih lanjut dalam kerangka pemikiran.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membutuhkan suatu kerangka pemikiran yang terstruktur dan relevan untuk mempertajam alur dan analisis. Teori liberalisme sosiologis (berserta *cobweb model*) digunakan peneliti sebagai landasan teori utama dalam penelitian ini.

Teori ini menggarisbawahi pada pentingnya interaksi antar aktor transnasional seperti aktor pemerintah, kelompok masyarakat sipil, OI, dan lain sebagainya dalam dinamika hubungan internasional.³⁹ Liberalisme sosiologis memandang hubungan antar manusia sebagai suatu hal yang jauh lebih kooperatif dan kompleks sehingga dapat mendorong terjadinya kerja sama dan perdamaian. Hubungan antar aktor juga dapat mendorong terbentuknya *security community* melalui proses integrasi yang terjadi antara satu kelompok masyarakat ke dalam kelompok tertentu yang lebih besar. Sehingga, suatu permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik pada suatu masyarakat dapat teredam.⁴⁰

Namun, perlu adanya penggunaan konsep lain dalam menjelaskan terjadinya proses integrasi pengungsi yang lebih komprehensif daripada teori liberalisme sosiologis. *Integration framework* digunakan sebagai konsep utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah yang terjadi di Turki. Penelitian ini melihat proses integrasi yang terjadi pada para pengungsi Suriah berdasarkan empat indikator utama yang merupakan bagian dari kebutuhan para pengungsi yaitu *markers and means, foundations, social connections*, dan *facilitators*.⁴¹ Proses integrasi pengungsi Suriah terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan para pengungsi berdasarkan kepada empat indikator tersebut yang

³⁹Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.90-93; Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches (Fifth Edition)*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal.102-105. Hubungan antar aktor transnasional dinilai jauh lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan interdependensi daripada hubungan antar negara.

⁴⁰ Jackson dan Sorensen, *Ibid*. Terdapat empat tahap utama yang dapat membentuk *security community* yaitu peningkatan dalam proses komunikasi sosial, mobilitas manusia, hubungan perekonomian, dan *social exchange*.

⁴¹ Alastair Ager dan Alison Strang, *Understanding Integration: A Conceptual Framework*, *Journal of Refugee Studies Vol 21 No 2 Oxford University Press*, 17 April 2008, hal.166-191, doi:10.1093/jrs/fen016. Konsep ini dipilih untuk memperjelas penemuan (*findings*) dan mempertajam argumen dalam penelitian. Ager dan Strang mengembangkan konsep ini melalui kajian pustaka berbagai literatur mengenai studi migrasi dan pengungsi serta melalui analisis terhadap laporan Majelis Eropa mengenai indikator dan tolak ukur integrasi pengungsi. Dalam pengembangan konsep ini, kedua sarjana tersebut juga melakukan lebih dari 62 wawancara dengan pengungsi berstatus resmi (*formal refugee status*) dan penduduk lokal non-pengungsi di Inggris.

difasilitasi oleh para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO. Penting untuk mengetahui interaksi antar aktor yang berdasarkan kepada kerja sama, kesamaan pandangan, dan program pemenuhan kebutuhan pengungsi yang diselenggarakan oleh para aktor tersebut yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, konsep *integration framework* juga memerlukan konsep lainnya seperti *cobweb model* untuk menjelaskan interaksi antar aktor yang mendorong terjadinya proses integrasi.

Konsep *integration framework* juga digunakan karena masih sedikitnya teori maupun konsep yang membahas mengenai isu migrasi dalam ilmu hubungan internasional. Menurut Ager dan Strang, proses integrasi pengungsi merupakan suatu konsep yang sering kali dipakai dalam berbagai diskursus politik, khususnya mengenai penanganan pengungsi.⁴² Proses integrasi dikatakan sebagai sebuah proses *two-way* yang melibatkan pengungsi dan masyarakat di negara penerima. Belakangan ini, integrasi dijadikan salah satu cara untuk menangani krisis pengungsi oleh berbagai aktor termasuk negara dan organisasi internasional. Namun, tidak terdapat definisi umum yang diterima oleh banyak pihak terkait integrasi pengungsi sehingga diskursus mengenai integrasi pengungsi masih menjadi topik yang sering diperdebatkan.⁴³

Konseptualisasi dari proses integrasi pengungsi sangatlah subjektif terhadap kepentingan, nilai, pandangan, dan kondisi politik dari negara penerima.⁴⁴ Penelitian

⁴² Ager dan Strang, 2008.

⁴³ Ibid, hal.167; Nando Sigona, "Refugee Integration(s): Policy and Practice in the European Union," *Refugee Survey Quarterly* 24, no. 4 (January 2005): pp. 115-122, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi093>.

⁴⁴ Sigona, hal.118; "Harmonisation," Directorate General of Migration Management (Republic of Turkey: Ministry of Interior), accessed November 11, 2021, <https://en.goc.gov.tr/about-harmonisation.>; dan Battala dan Tolay, 2018. Turki merupakan salah satu negara yang mengonseptualisasi pandangannya terhadap proses integrasi pengungsi. Konseptualisasi ini dilakukan karena tidak populernya istilah integrasi dalam pandangan masyarakat Turki secara umum yang ditandai dengan tingginya stigma masyarakat terhadap para pengungsi Suriah. Sehingga, Ankara

ini menggunakan beberapa pandangan dari para ahli dan data organisasi internasional untuk mendefinisikan konsep integrasi pengungsi dalam penelitian ini. European Council on Refugees and Exile (ECRE) menjelaskan bahwa integrasi pengungsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengungsi dan komunitas masyarakat di negara penerima yang umumnya bersifat dinamis, setidaknya bersifat dua arah (*two-way*), berjangka panjang, dan multidimensional atau melibatkan partisipasi pengungsi dalam aspek-aspek sosial di negara penerima.⁴⁵ Bagian mengenai proses dua arah yang ditawarkan dalam definisi ECRE sering kali dikritik oleh para sarjana. Mereka beranggapan bahwa integrasi merupakan proses yang tidak hanya melibatkan para pengungsi dan komunitas masyarakat di negara penerima saja. Tetapi, integrasi melibatkan berbagai aktor seperti OI dan NGO serta pemangku kepentingan lokal yang sering kali memiliki perbedaan sudut pandang politik dan cara pikir dalam menyikapi kehadiran pengungsi.⁴⁶

Terdapat empat indikator utama pada konsep *integration framework*.⁴⁷ Indikator pertama adalah *markers and means* yang terdiri atas akses para pengungsi terhadap bidang pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan di negara penerima. Indikator ini dijadikan sebagai indikator utama yang mengukur kesuksesan

memutuskan untuk menggunakan istilah "harmonisasi" yang pada prinsipnya mengikuti karakteristik integrasi yang dikembangkan oleh ECRE. Ankara juga cenderung mendorong proses "harmonisasi" berjalan melalui pembentukan kebijakan seperti RWPFTP, ILFL, dan RTP. Meskipun begitu, pengungsi Suriah tetap dihadapkan oleh beberapa permasalahan seperti adanya limitasi dalam bergerak dan cukup tingginya stigma negatif masyarakat Turki terhadap eksistensi mereka. Seiring waktu, Ankara menjadi semakin kesulitan dalam mengatasi krisis pengungsi yang terjadi di negaranya. Sehingga, Ankara menjadi lebih terbuka terhadap kehadiran aktor-aktor lain, khususnya OI dan NGO, yang turut membantu memenuhi kebutuhan dari para pengungsi Suriah.

⁴⁵ "ECRE Position on the Integration of Refugees in Europe" (European Council on Refugees and Exile, December 2002), https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Position-on-the-Integration-of-Refugees-in-Europe_December-2002.pdf. Dikatakan bahwa integrasi pengungsi membutuhkan upaya atau dorongan dari diri pengungsi yang datang ke negara penerima untuk beradaptasi dengan budaya setempat tanpa perlu menghilangkan karakter, ciri khas, atau identitas budaya dari negara asal. Begitupun dengan masyarakat di negara penerima yang harus dapat merangkul dan menerima kehadiran para pengungsi serta berinisiatif dalam memberikan akses bantuan terhadap para pengungsi dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan di negara penerima.

⁴⁶ Sigona, hal.118

⁴⁷ Ager dan Strang, 2008.

dari proses integrasi yang terjadi di negara penerima. Apabila pengungsi telah mendapatkan akses yang setara dengan masyarakat setempat dalam keempat bidang di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengungsi telah terintegrasi dengan baik di negara penerima. Selain itu, data statistik juga digunakan untuk mengukur seberapa jauh para pengungsi telah terintegrasi dalam indikator *markers and means*. Indikator kedua adalah *foundation*. Indikator ini terdiri atas hak kewarganegaraan, hak kesetaraan, dan hak-hak lainnya yang semestinya didapatkan oleh para pengungsi. Di sisi lain, terdapat faktor dorongan dari negara penerima terhadap para pengungsi untuk melepaskan kewarganegaraan sebelumnya untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas dan hak-hak sipil di negara penerima. Dalam indikator ini, integrasi dapat dilihat apabila para pengungsi telah mendapatkan hak yang serupa dengan masyarakat setempat dalam hal kesetaraan, keamanan, dan kebebasan untuk mempertahankan budaya dan kepercayaan asal.

Indikator ketiga adalah *social connection* yang berdasar pada tiga bidang utama yaitu koneksi sosial antara pengungsi dengan kelompok pengungsi lainnya), koneksi sosial antara pengungsi dengan komunitas masyarakat lokal, dan koneksi sosial antara pengungsi dengan lembaga pemerintah negara penerima).⁴⁸ Ketiga bidang tersebut dapat memengaruhi terjadinya proses integrasi pengungsi dalam lingkup nasional. Dalam indikator ini, diperlukan untuk menganalisis data mengenai opini publik masyarakat di negara penerima terhadap kehadiran dari para pengungsi untuk melihat seberapa jauh proses integrasi telah terjadi. Terakhir, terdapat indikator *facilitators* yang terdiri atas pemahaman para pengungsi terhadap bahasa dan budaya

⁴⁸ Ager dan Strang, Ibid.

lokal dan keamanan dan stabilitas sosial bagi para pengungsi. Dalam hal ini, proses integrasi dapat dilihat berdasarkan interaksi pengungsi dengan masyarakat lokal dan persepsi pengungsi terhadap stabilitas keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Para pengungsi harus aman dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.

Selama ini, pemenuhan kebutuhan pengungsi yang berdasarkan pada empat indikator *integration framework* telah difasilitasi oleh aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO. Sehingga, penting untuk mengetahui interaksi yang terjadi di antara para aktor tersebut yang dapat mengurangi barrier integrasi dan mendorong terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah di Turki. Interaksi ini dapat ditinjau melalui penggunaan *cobweb model* yang menekankan pada kerja sama antar aktor berdasarkan pandangan maupun kepentingan dari para aktor dalam membantu pemenuhan kebutuhan pengungsi melalui program maupun bantuan lainnya. Para aktor memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Interaksi antar aktor seperti negara, OI, dan NGO dapat memunculkan suatu pola interaksi yang saling tumpang tindih (*overlapping*) dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.⁴⁹

Interaksi tersebut juga memunculkan adanya komunikasi antar aktor selaku bagian dari komunitas masyarakat internasional (*World Society*). Berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam komunitas internasional dapat dicapai apabila para aktor dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lainnya.⁵⁰ Dalam kasus ini, interaksi dan kerja sama antar aktor dalam pemenuhan kebutuhan

⁴⁹ John W. Burton, "Conceptualizing and Models," in *World Society* (Cambridge University Press, 1972), hal. 35-45.

⁵⁰ *Ibid*, hal.43

pengungsi dianggap sebagai sebuah kewajiban moral dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sesuai dengan isi dari Konvensi Pengungsi 1951.⁵¹ Sehingga, para aktor dapat melindungi dan meningkatkan keselamatan serta stabilitas sosial bagi para pengungsi yang dapat mendorong terjadinya proses integrasi.

Pengunaan *cobweb model* juga dapat memperlihatkan *security community* karena adanya program maupun bantuan yang ditawarkan oleh para aktor bagi para pengungsi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan resiliensi sekaligus meredam permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Penggunaan konsep *cobweb model* juga dapat membantu memahami terjadinya proses integrasi berdasarkan pada indikator dari *integration framework*. *Cobweb model* dapat menunjukkan indikator integrasi yang menjadi fokus utama dari para aktor maupun indikator integrasi lainnya yang masih belum menjadi fokus utama sehingga masih terdapat permasalahan (barier) yang dapat menghambat terjadinya proses integrasi pengungsi.

Berdasarkan pemaparan kerangka penelitian ini, analisis terhadap proses integrasi pengungsi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan para pengungsi Suriah yang sesuai dengan empat indikator dari *integration framework*. Empat indikator tersebut dapat menjelaskan bagaimana terjadinya proses integrasi pengungsi Suriah serta barier yang dihadapi oleh para pengungsi dan masyarakat lokal dalam proses integrasi. Adapun proses integrasi terjadi karena pemenuhan kebutuhan para pengungsi yang difasilitasi oleh para aktor seperti Pemerintah Turki, OI, dan NGO

⁵¹ Niklas Ernst, "Liberal and Realist Explanations of Merkel's 'Open-Door Policy' During the 2015 Refugee Crisis" (*Inquiries Journal*, February 1, 2021), <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1870/liberal-and-realist-explanations-of-merkels-open-door-policy-during-the-2015-refugee-crisis>.

yang saling berinteraksi berdasarkan kepentingannya dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi melalui program dan bantuan lainnya. Dalam penelitian ini, interaksi para aktor yang mendorong terjadinya proses integrasi ini dianalisis melalui aplikasi terhadap *cobweb model*.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis deskriptif terhadap suatu teks atau dokumen yang dapat mendukung proses penelitian.⁵² Metode kualitatif juga menekankan pada interpretasi deskriptif peneliti terhadap objek yang sedang atau akan diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui proses dari bagaimana sebuah fenomena terjadi.⁵³ Terdapat tiga tahapan utama yang ditekankan dalam penelitian melalui metode kualitatif. Pertama, peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu sesuai dengan topik dan tipe data yang akan digunakan dalam penelitian. Kedua, data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti. Ketiga, data yang telah dianalisis diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses interpretasi data ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi dan observasi berulang terhadap fenomena yang diteliti.

⁵² Ariadne Vromen, "Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches", dalam buku *Theory and Methods in Political Science*, e.d. David Marsh dan Gerry Stoker (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010), hal.249-266.

⁵³ John W. Creswell, "Qualitative Methods", dalam buku digital *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage, 2014), hal.463-527.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen. Penulis mengumpulkan literatur berbentuk artikel jurnal, dokumen resmi dari pemerintah, OI, dan NGO, buku, dan artikel berita dari sumber yang sah dan terpercaya untuk mendukung proses penelitian.⁵⁴ Teknik pengumpulan ini mempermudah proses penelitian karena dapat menginterpretasi teks yang dikumpulkan secara langsung dan teknik ini tidak memakan waktu penelitian yang lama apabila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Adapun kelemahan dari teknik pengumpulan studi pustaka dan dokumen dalam penelitian ini adalah keterbatasan data yang netral karena mayoritas data merupakan keluaran dari pemerintah maupun institusi tertentu.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing menjelaskan mengenai permasalahan dan analisis penelitian, yaitu:

Bab 1 yang membahas mengenai berbagai informasi yang menjadi latar belakang dan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini memuat mengenai pembatasan dan perumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga mencantumkan tiga literatur dan kerangka penelitian untuk dijadikan pedoman penelitian di beberapa bab selanjutnya. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data turut dibahas di dalam bab ini.

⁵⁴ Creswell, Ibid.

Bab 2 yang membahas mengenai keadaan dari pengungsi Suriah di Turki. Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum para pengungsi Suriah dari tahun 2015-2019. Bab ini juga membahas mengenai empat permasalahan utama serta kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Turki dalam menangani para pengungsi Suriah.

Bab 3 yang menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses integrasi pengungsi. Aktor-aktor tersebut terbagi atas aktor pemerintah seperti DGMM dan AFAD dan aktor non-pemerintah seperti Türk Kizilay, UNHCR, IOM, dan UNDP. Pembahasan mengenai aktor-aktor ini meliputi pada profil singkat dan program bantuan yang disalurkan bagi para pengungsi.

Bab 4 yang menganalisis proses integrasi pengungsi Suriah di Turki dalam kurun waktu 2015-2019 dengan menggunakan empat indikator dari konsep *integration framework* untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga membahas mengenai interaksi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah yang memfasilitasi terjadinya proses integrasi melalui bantuan maupun program bagi para pengungsi. Interaksi tersebut dianalisis melalui *cobweb model*.

Bab 5 yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ditarik melalui identifikasi serta rumusan permasalahan.

